

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MODEL KAMPUNG KONSERVASI TAMAN NASIONAL

**Ginung Pratidina**

Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik Universitas Djuanda Bogor  
Jl. Raya Tol Ciawi No 1 Bogor, Telp/Faks 0251-8244773/8240985  
Email: ginung.pratidina@unida.ac.id

**Abstract: Policy Implementation of the National Parks Conservation Village Model.** This study aims to determine the model of policy implementation hometown conversion Hazy Salak Mountain National Park in kelestaria environmental improvement and welfare of the community . Locations were taken in two villages namely indigenous villages and rural villages Kesepuhan regular administration Sukagalih village . Using research methods research study participation action , where the data obtained with the aim of finding problems with new measures to solve problems , and improve the employment situation . Data were collected from 30 imforman consist of the officers involved in the management and villagers elected GHSNP . Analysis of the data through qualitative analysis of the data obtained by the method of workshops , focus groups and diaries ( log book ) . The results showed that the implementation of policies Conversion Model Kampung Salak Mountain National Park (MKK GHSNP) in improving the forest environment and the welfare of society has not been effective . The main factor is the cause for differences in the perception of the cultural values of the two communities on the concept of sample MKK.

**Keywords:** policy implementation , conservation , reforestation , rehabilitation , participatory observation.

Abstract: Policy Implementasi Kebijakan Model Kampung Konservasi Taman Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan model kampung konversi Taman Nasional gunung Halimun Salak dalam peningkatan kelestaria lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Lokasi penelitian diambil dua desa yaitu desa adat kampung Kesepuhan dan desa administrasi pemerintahan biasa kampung Sukagalih. Metode penelitian menggunakan studi partisipasi aksen riset, dimana data didapatkan dengan tujuan menemukan masalah dengan tindakan baru untuk memecahkan masalah, dan memperbaiki situasi kerja. Data dikumpulkan dari 30 imforman terdiri dari petugas yang terlibat dalam pengelolaan TNGHS dan penduduk desa terpilih. Analisis data melalui analisis kualitatif terhadap data yang diperoleh dengan metode lokakarya, fokus group dan catatan harian (log book). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Model Kampung Konversi Taman Nasional Gunung Salak (MKK TNGHS) dalam peningkatan kelestarian lingkungan hutan dan kesejahteraan masyarakat belum efektif. Faktor utama penyebabnya adalah karena perbedaan persepsi nilai-nilai budaya dari masyarakat kedua desa sample tentang konsep MKK.

**Kata kunci:** implementasi kebijakan, konservasi, reboisasi, rehabilitasi, observasi partisipatoris.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki area hutan yang luas sehingga dapat dikatakan sebagai paru paru dunia. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perhatian pemerintah terhadap keharusan melakukan pelestarian hutan menjadi prioritas utama yang harus dilaksanakan, mengingat fungsi hutan di Indonesia berperan besar dalam memenuhi kebutuhan manusia,

seperti penyediaan bahan baku kayu untuk pembangunan, penyediaan sumber bahan makanan, obat obatan, bahan baku industry dan juga berfungsi menyediakan udara segar, sumber air dan menghindari bencana banjir, erosi dan kekeringan. Salah satu bentuk penerapan konservasi sumber daya alam hayati adalah dengan pembentukan Taman Nasional yang dibuat dalam rangka upaya mewujudkan kelestarian sumber daya alam

hayati serta keseimbangan ekosistem sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Dengan berpijak pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 282/Kpts-II/1992 tanggal 28 Februari 1992 kawasan Ekosistem Gunung Halimun Salak ditetapkan sebagai kawasan konservasi dengan nama Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) dengan luas kawasan berkisar seluas 40.000 hektar. Selanjutnya melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003 kawasan TNGH bertambah dengan area Gunung Salak sehingga menjadi satu kesatuan TNGHS dengan luas total 113.357 ha. Kawasan tersebut tersebar di tiga wilayah kabupaten, yaitu kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

Perluasan tersebut membawa dampak social ekonomi dan kemasyarakatan, di mana masyarakat yang sejak lama menggantungkan hidupnya dari hasil hutan, sedikit banyak mulai terbatas kehidupannya. Oleh karenanya, sejak Februari 2004 Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) sebagai pengelola kawasan TNGHS bersama *Japan international Cooperation Agency (JICA)* di bawah naungan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA) Departemen Kehutanan Republik Indonesia, melakukan kerjasama dalam hal pengelolaan kawasan TNGHS. Kerjasama tersebut diwadahi dalam *Japan International Cooperation Agency Gunung Halimun Salak National Park Management Project* atau disingkat menjadi *JICA GHSNP-MP* yang bertujuan untuk meningkatkan upaya pengelolaan sumber daya hutan dan keanekaragaman hayati di TNGHS dengan mengutamakan terciptanya kelestarian hutan. Sebagai wujud dari kerjasama tersebut maka Balai TNGHS bersama JICA membuat suatu program Model TNGHS yang mengedepankan ide sejahtera bersama TNGHS yang dituangkan dalam bentuk program Model Kampung Konservasi (MKK).

Balai TNGHS dan JICA GHSNP-MP saling berkoordinasi dengan mencoba menengahi permasalahan yang terjadi dengan mengemukakan Model Kampung Konservasi untuk menjembatani kepentingan masyarakat dan kepentingan pihak manajemen TNGHS.

Penelitian ini menjadi penting karena pengembangan Model kampung Konservasi merupakan terobosan dalam upaya meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat desa di sekitar kawasan konservasi. Pada intinya Kampung Konservasi merupakan pembentukan kelompok masyarakat dengan mempertimbangkan keperluan masyarakat yang memiliki ketergantungan dengan sumber daya hutan sehingga diberikan solusi bersama dari pihak TNGHS untuk bersama sama mengelola hutan secara efisien. Berdasarkan data sekunder yang dikeluarkan oleh BTNGHS (2005) Program Model kampung Konservasi meliputi tiga kegiatan yaitu :

- (1) Reboisasi / Rehabilitasi meliputi: (a) Sosialisasi kegiatan (b); Perencanaan Bersama Masyarakat (c); Penanaman tanaman yang berfungsi secara konservasi, ekonomi dan sosial (d); Pola tanam tidak secara monokultur (e); Penerapan dan pengaturan pola tanam dari tanaman jangka pendek sampai jangka panjang (f); Tumpang sari (tanaman rendah, sedang, tinggi) (g); Pembuatan pembibitan (h); Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pembibitan (i); Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan pembibitan dan teknik tanaman.
- (2) Observasi Secara Partisipatoris meliputi: (a) Mengamati bersama kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman potensi (b); Observasi bersama dilakukan dan disaksikan oleh pihak pihak yang terkait (Masyarakat, LSM, Balai TNGHS, Pemerintah Daerah) (c); Observasi bersama bisa menjadi media untuk membangun kesadaran terhadap kawasan hutan (d); Observasi dilakukan untuk melihat potensi yang ada dalam kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan.

kan secara ekonomi oleh masyarakat (terutama hasil hutan non kayu)

- (3) Peningkatan Pendapatan Masyarakat meliputi: (a) Kelompok usaha bersama yang bergerak dalam pengelolaan hasil hutan non kayu (b); Pengelolaan ekowisata yang dikelola bersama masyarakat (c); Pengembangan tanaman industri atau bahan kerajinan (bambu, rotan) (d); Pengembangan teknologi tepat guna dan pengelolaan pasca panen (e); Membangun pemasaran bagi produk non kayu yang bisa dikembangkan. (f); Ketersediaan informasi pasar bagi masyarakat (g); Peningkatan kapasitas masyarakat melalui : pelatihan, studi banding, magang, pendidikan formal (h); Integrasi program melalui pendampingan berkelanjutan mulai dari peningkatan kapasitas.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Petugas TNGHS (2012), ternyata implementasi ketiga kegiatan program Model Kampung Konservasi di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak saat ini belum berjalan efektif dengan kategori berjalan baik, bahkan ada yang tidak berjalan samasekali. Kebijakan program kampung konservasi pada awalnya dilakukan oleh JICA (2004-2007) dengan Pilot project Kampung Sukagalih, Kampung Cimagpag, Desa Cisalimar dan Desa Sirnaesmi. Setelah program pilot project selesai, mulai tahun 2008 program Kampung Konservasi dilakukan dengan melibatkan instansi lainnya melalui program CSR maupun Program pemerintah seperti Dinas Kehutanan Banten, Dinas Kehutanan Jawa Barat PLN, Antam, CIFOR dan TNGHS. Program yang dilakukan umumnya berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing masing wilayah.

Dari latar belakang tersebut pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana implementasi kebijakan Model kampung Konservasi (MKK) Taman Nasional Gunung Halimun Salak dalam peningkatan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis budaya lokal.

Kebijakan pemerintah dalam upaya

mengatasi konflik akibat diterapkannya kebijakan perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak diperlukan untuk menjembatani antara kepentingan pemerintah dan masyarakat, sehingga dapat meminimalisir konflik yang timbul. Salah satu kebijakan yang diambil yaitu kebijakan Model Kampung Konservasi dilakukan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dan memberikan solusi dalam upaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap hutan. Sehubungan dengan itu perlu diadakan penilaian terhadap implementasi kebijakan Model Kampung Konservasi (MKK) dalam rangka peningkatan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Penilaian kebijakan, menurut Charles O.Jones (1991), adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dirancang untuk menilai hasil-hasil program pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi objeknya., teknik-teknik pengukurannya dan metode analisisnya. Dari sudut objek berarti menilai hasil macam program yang dilaksanakan pemerintah dengan problematika-problema yang dihadapi masyarakat. Dari sudut teknik penilaian yaitu cara-cara untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna menilai hasil program-program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. Dari sudut metode analisis maka akan dapat menilai atau menyimpulkan hasil akhir dari kegiatan program pemerintah, apakah efektif atau tidak.

Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Model Kampung Konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dalam rangka peningkatan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis nilai budaya lokal.

## **METODE**

Metode yang digunakan adalah metode partisipatoris yaitu metode dengan melibatkan langsung antara peneliti dengan yang diteliti. Metode ini menggunakan metode partisipasi *action research* yaitu penelitian tindakan (*Action Research*) adalah cara il-

miah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat ditemukan masalah dan tindakan baru yang dapat digunakan untuk dapat ditemukan masalah dan tindakan baru yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah, memperbaiki atau meningkatkan situasi kerja.

Lokasi yang diambil adalah desa adat (Kasepuhan) yaitu Kampung Sinaresmi dan desa yang memiliki administrasi pemerintahan biasa yaitu Kampung Suka-galih Desa Cipeuteuy yang berbatasan langsung dengan TNGHS di kabupaten Sukabumi. Alasan yang diambil dalam memilih dua tipe desa tersebut karena kedua desa tersebut merupakan desa yang dijadikan Pilot Project. Selain itu, Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak memiliki wilayah yang unik, yaitu desa adat dimana penduduknya memiliki karakteristik sangat patuh kepada pimpinan adatnya, dan desa dengan sistem administrasi pemerintahan biasa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka peneliti menetapkan Kampung Sukagalih dan Kampung Sinaresmi sebagai lokasi penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari 30 informan yang terdiri dari petugas Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Polisi Hutan, Kepala Desa, Pemimpin Kasepuhan (Kepala Adat), Penanggungjawab MKK dan sejumlah penduduk desa terpilih.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data tentang implementasi kebijakan kampung konservasi di sekitar wilayah Taman nasional Gunung Halimun Salak, dimana data diperoleh dari lokakarya/ seminar FGD dan melalui catatan harian (logbook).

## **HASIL**

Model Kampung Konservasi (MKK) merupakan hal baru dalam upaya meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat desa di sekitar kawasan konservasi. Pada intinya MKK, merupakan komunitas tertentu yang terdapat di dalam kawasan konservasi yang hidup dan berkembang bergantung pada pemanfaatan sumber daya

alam hayati di dalam kawasan konservasi secara berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di sekitar hutan.

Program Model kampung Konservasi meliputi tiga kegiatan yaitu restorasi/ rehabilitasi, observasi secara partisipatoris dan peningkatan pendapatan masyarakat. Berdasarkan rincian aktivitas dari tiga kegiatan MKK tersebut akan dinilai tingkat efektivitas program MKK sebagai program pemberdayaan masyarakat, dengan mengambil dua contoh masyarakat yang berhasil menerima MKK yaitu Masyarakat di Kampung Suka-galih dan program MKK yang tidak berhasil khususnya pada kampung-kampung adat Kasepuhan.

## **Reboisasi/Rehabilitasi**

Pelaksanaan kegiatan reboisasi/rehabilitasi terdiri dari 9 kegiatan seperti tercantum dalam tabel 1.

Pada Masyarakat Sukagalih, semua kegiatan direspon dengan positif sehingga kegiatan rehabilitasi dan reboisasi bisa berjalan sesuai dengan konsep MKK yang menjadi program BTNGHS. Adapun pada masyarakat Sirna Resmi, tidak semua kegiatan direspon secara positif, khususnya kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara adat Kasepuhan sudah mempunyai tatacara dan aturannya sendiri. Misalnya kegiatan tumpangsari dicurigai oleh masyarakat sebagai upaya taman nasional untuk mengusir secara halus masyarakat dari kawasan taman nasional. Kegiatan sosialisasi dan perencanaan bersama masyarakat dipandang tidak tuntas dilakukan karena tidak melibatkan para pengurus Kasepuhan, seakan-akan pemerintah berusaha memisahkan masyarakat dari kelembagaan Kasepuhan. Keinginan masyarakat Kasepuhan bahwa kegiatan sosialisasi dan perencanaan bersama sudah menjadi bagian dari kesepakatan antara TNGHS dengan masyarakat adat dimana hak otoritas adat juga diakui keberadaannya dan hak-haknya terhadap pengelolaan hutan dan kawasan hutan.

Tabel 1. Evaluasi terhadap penerimaan program di dua lokasi dilihat dari indikator kegiatan reboisasi/ rehabilitasi

No	Rincian Kegiatan	Kampung Sukagalih	Kampung Sinar Resmi
1	Sosialisasi kegiatan	+	-
2	Perencanaan bersama masyarakat	+	-
3	Penanaman tanaman yang berfungsi secara konservasi, ekonomi dan sosial	+	+
4	Pola tanam tidak secara monokultur	+	+
5	Penerapan dan pengaturan pola tanam dari tanaman jangka pendek sampai jangka panjang	+	+
6	Tumpang sari (tanaman rendah, sedang, tinggi)	+	-
7	Pembuatan pembibitan	+	+
8	Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pembibitan	+	+
9	Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan pembibitan dan teknik tanaman.	+	-

Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan pembibitan dan teknik tanaman juga tidak direspon positif, karena masyarakat adat sudah memiliki pengetahuan sendiri tentang tata cara pembibitan dan tata cara tanam yang kemungkinan berbeda dan bertentangan dengan prinsip penanaman pemerintah. Pola tanam satu tahun sekali dalam pandangan masyarakat adat berbeda dengan pola tanam yang dianjurkan oleh pemerintah (intensifikasi) yang dapat meningkatkan produksi, misalnya menerapkan pola tanam satu tahun dua kali atau satu tahun tiga kali.

### Observasi Partisipatoris

Kegiatan program MKK yang kedua adalah observasi partisipatoris. Hasil evaluasi kegiatan observasi partisipatoris di Kampung Sukagalih dan Sinar Resmi dapat dikemukakan pada tabel 2.

Kegiatan MKK dilihat dari indikator observasi partisipatoris umumnya direspon secara positif oleh masyarakat di Kampung Sukagalih sedangkan pada masyarakat Sinar Resmi tidak seluruhnya direspon positif (Tabel 2). Hal ini menunjukkan bahwa program MKK lebih efektif di Kampung Sukagalih dibandingkan dengan di Sinar Resmi.

Kegiatan observasi partisipatoris meliputi kegiatan mengamati bersama kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman potensi. Kegiatan observasi bersama dilakukan dan disaksikan oleh pihak-pihak yang terkait (Masyarakat, LSM, Balai TNGHS, Pemerintah Daerah). Kegiatan observasi bersama bisa menjadi media untuk membangun kesadaran terhadap kawasan hutan, melihat potensi yang ada dalam kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi oleh masyarakat (terutama hasil hutan non kayu). Manfaat ekonomi adalah berupa tanaman palawija dan mata pencaharian lainya seperti jasa *home stay*, catering, karipik singkong dan jasa *guide*.

Kegiatan mengamati bersama kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman potensi merupakan kegiatan pertama yang dilakukan dalam konteks kegiatan observasi partisipatoris dalam program MKK. Namun kegiatan ini tidak berarti bahwa masyarakat bersama-sama dengan BTNGHS telah melakukan kegiatan analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Kegiatan ini berupa kegiatan yang dilakukan dalam kerangka pengawasan dan pengendalian hutan dari berbagai ancaman. Oleh karena itu diberi kode positif dan

Tabel 2. Evaluasi terhadap penerimaan program di dua lokasi dilihat dari indikator kegiatan observasi secara partisipatoris

No	Rincian kegiatan	Kampung Sukagalih	Kampung Sinar Resmi
1	Mengamati bersama kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman potensi	+	+
2	Observasi bersama dilakukan dan disaksikan oleh pihak-pihak yang terkait (Masyarakat, LSM, Balai TNGHS, Pemerintah Daerah)	+	-
3	Observasi bersama bisa menjadi media untuk membangun kesadaran terhadap kawasan hutan	+	+
4	Observasi dilakukan untuk melihat potensi yang ada dalam kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi oleh masyarakat (terutama hasil hutan non kayu)	+	+

negatif. Pada masyarakat Kampung Sukagalih dilakukan dengan koordinasi dari BTNGHS, sedangkan pada masyarakat Sinar Resmi dikoordinasikan oleh kelembagaan Kasepuhan.

Pada kegiatan observasi bersama dilakukan dan disaksikan oleh pihak-pihak yang terkait (Masyarakat, LSM, Balai TNGHS, Pemerintah Daerah) direspon positif di kampung Sukagalih, sedangkan di Sinar Resmi dianggap negatif, karena kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Sinar Resmi merupakan kegiatan yang dikomandoi oleh Abah selaku ketua adat kasepuhan, walaupun ada melibatkan LSM atau Pemerintah Daerah, bukan berarti Kasepuhan setuju dengan konsep MKK yang dibuat oleh BTNGHS. Selanjutnya baik masyarakat di Kampung Sukagalih dan Sinar Resmi menganggap bahwa kegiatan observasi bersama bisa menjadi media untuk membangun kesadaran terhadap kawasan hutan dan melihat potensi yang ada dalam kawasan untuk dimanfaatkan secara ekonomi tanpa merusak lingkungan hutan.

### Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Adapun penerimaan proyek dilihat dari indikator peningkatan pendapatan masyarakat, dapat dilihat pada tabel 3.

Perbedaan tanggapan masyarakat dalam menerima program MKK dilihat dari pengaruh kegiatan MKK tersebut terhadap peningkatan pendapatan masyarakat (Tabel 3) Pada Masyarakat Sukagalih umumnya direspon positif sedangkan pada masyarakat Sinar Resmi umumnya direspon negatif. Hal ini disebabkan karena masyarakat Sinar Resmi adalah masyarakat Kasepuhan yang masih memegang teguh nilai-nilai budaya, dimana mereka terlarang untuk mengeksploitasi hutan untuk kepentingan ekonomi, termasuk adanya pelarangan menjual hasil pertanian padi. Oleh karena itu pada masyarakat Sinar Resmi belum mengenal strategi pemasaran produk termasuk memanfaatkan hutan non kayu untuk kepentingan sumber ekonomi. Mereka masih terpatir pada *sistem livelihood* yang bersumber dari pertanian padi.

Berdasarkan analisis terhadap kegiatan MKK tersebut diketahui bahwa kegiatan MKK di Kampung Sukagalih lebih efektif dibandingkan dengan kegiatan di Sinar Resmi. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor. Salah satunya adalah sikap Kasepuhan yang kurang menerima kegiatan MKK yang dicurigai sebagai upaya memecah belah masyarakat adat.

Tabel 3. Evaluasi terhadap penerimaan program di dua lokasi dilihat dari indikator kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat

No	Rincian kegiatan	Kampung Sukagalih	Kampung Sinar Resmi
1	Kelompok usaha bersama yang bergerak dalam pengelolaan hasil hutan non kayu	+	-
2	Pengelolaan ekowisata yang dikelola bersama masyarakat	+	-
3	Pengembangan tanaman industri atau bahan bahan kerajinan (bambu, rotan)	+	+
4	Pengembangan teknologi tepat guna dan pengelolaan pasca panen	+	-
5	Membangun pemasaran bagi produk non kayu yang bisa dikembangkan.	+	-
6	Ketersediaan informasi pasar bagi masyarakat	+	-
7	Peningkatan kapasitas masyarakat melalui : pelatihan, studi banding, magang, pendidikan formal	+	+
8	Integrasi program melalui pendampingan berkelanjutan mulai dari peningkatan kapasitas.	+	-

## PEMBAHASAN

Kampung konservasi merupakan sebuah kebijakan dan strategi pemberdayaan masyarakat yang dimulai pada tahun 2004 dengan uji coba proyek di Desa Cipeuteuy dan Desa Gunung Malang. Pada dua lokasi tersebut Balai TNGHS menerapkan pola percontohan kampung yang disebut model kampung konservasi (MKK). Di Desa Cipeuteuy terdapat lima kampung yaitu Cisarua, Cilodor, Sukagalih, Cisalimar1 dan Cisalimar 2 yang berbatasan langsung dengan TNGHS. Didaerah tersebut terdapat lahan garapan seluas 120 hektar bekas pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) Perum Perhutani yang kini dikelola oleh 206 warga. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas TNGHS diketahui bahwa kebijakan kampung konservasi merupakan suatu kebijakan di mana masyarakat diberi pemahaman akan pentingnya nilai nilai untuk menjaga pelestarian hutan. Kebijakan tersebut difokuskan kepada tiga kegiatan yaitu restorasi/ rehabilitasi hutan, observasi partisipatoris dan income generating. Kebijakan ini sebenarnya merupakan upaya TNGHS

dalam rangka mendekati masyarakat agar mau berpartisipasi dalam pelestarian hutan, sehingga bisa mencegah perusakan hutan oleh masyarakat. Cara ini dipandang efektif mengingat pelarangan langsung masyarakat untuk merambah hutan bukan upaya yang populis karena ketergantungan masyarakat terhadap hutan sulit untuk diputus begitu saja, mengingat pemanfaatan hutan oleh masyarakat di sekitar hutan sudah turun temurun.

MKK bertujuan untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat di luar sumber daya hutan dan perbaikan kawasan kritis di sekitar kampung maupun di lahan garapan masyarakat. Melalui kegiatan MKK, masyarakat dipersilahkan menggarap di lahan TNGHS dengan catatan tidak memperluas daerah garapan baru. Namun izin tersebut tidak bersifat tertulis melainkan hanya informal, yaitu dipersilahkan tidak tetapi dilarang juga tidak, artinya masyarakat dan TNGHS saling tahu sama tahu. Hal ini dilakukan oleh TNGHS dalam rangka mendekati masyarakat, sehingga mereka dapat diajak bekerjasama untuk menjaga kelestarian

hutan. Kebijakan seperti ini juga ditemukan oleh Budiman Widodo (2013) dalam penelitiannya tentang kebijakan rencana tata ruang wilayah perbatasan kota dan kabupaten, dimana dalam penggunaan lahan pertanian di wilayah perbatasan, pemerintah tidak mengintervensi, tetapi pemerintah mengambil kebijakan yang bersifat membiarkan/membebasakan masyarakat mengatur sendiri dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Kebijakan pemerintah yang bersifat membiarkan masyarakat mengambil kebijakan sendiri dalam permasalahan penggarapan lahan di TNGHS, dapat mempunyai dampak positif dan negatif. Bagi masyarakat dampak positifnya adalah masyarakat dapat menentukan pilihan sendiri tanaman palawija dan tumpang sari di daerah konservasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dampak negatifnya adalah bahwa tidak semua masyarakat setuju dengan pemanfaatan penggarapan lahan di daerah konservasi, karena adanya perbedaan nilai-nilai budaya masyarakat di kedua desa daerah penelitian. Di kampung Sukagalih konsep MKK berhasil diterima dan dipahami masyarakat, sehingga dengan kesadarannya masyarakat dapat menjaga kelestarian hutan. Tetapi tidak semua masyarakat memiliki tanggapan yang sama tentang konsep MKK seperti yang terjadi pada kampung Sinar Resmi yang terikat pada otoritas adat Kesepuhan. Masyarakat di kampung Kesepuhan menganggap bahwa lahan konservasi MKK adalah lahan adat yang sudah lama mereka garap secara perlahan-lahan. Mereka diharuskan menanam kayu keras tetapi tidak boleh menebangnya untuk kepentingan membangun rumah. Selain itu mereka juga harus berhadapan dengan masalah hukum ketika ada masyarakat menebang kayu di tanah garapannya sendiri. Kondisi ini akan memunculkan konflik sosial antara masyarakat adat dengan aparat pengelola TNGHS. Sikap masyarakat pun mulai terpolarisasi ketika ditawarkan untuk bergabung dengan program “Kampung Konservasi” dari pihak TNGHS. Ada yang setuju mencoba berdamai dengan TNGHS, ada yang tetap menolak mengikuti sikap

pimpinan Kesepuhan, yang tetap pada keinginannya untuk memperoleh hak akses terhadap hutan (Rahmawati, dkk. 2008). Sehubungan dengan itu maka, dalam implementasi kebijakan, faktor budaya perlu diperhatikan. Bahkan dalam penelitian Faria Ruhana (2010) tentang implementasi kebijakan kurikulum tingkat satuan pendidikan, mengusulkan model pengembangan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan Edward III bahwa efektifitas implementasi kebijakan ditentukan oleh 4 indikator yaitu: sumberdaya; komunikasi; disposisi; struktur birokrasi ditambah dengan 1 indikator lagi yaitu budaya sehingga efektifitas implementasi kebijakan menjadi 5 indikator yaitu: sumberdaya; komunikasi; disposisi; struktur birokrasi dan budaya.

Dalam hal ini Balai TNGHS memperlakukan setiap masyarakat berbeda-beda tergantung wilayah, situasi dan kondisi. Permasalahan yang dihadapi di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga membutuhkan cara penanganan yang berbeda pula. Namun demikian, BTNGHS sendiri memiliki kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan petugas. Sebagai contoh Satu resort di Cihamerang hanya ditangani oleh dua orang PNS, dua orang Polisi Hutan dan dibantu oleh Pamswakarsa saja padahal wilayah satu resort luasnya kurang lebih 300 Ha. Keterbatasan tersebut menyebabkan BTNGHS harus dapat merekrut masyarakat untuk berpartisipasi dalam penjagaan dan pelestarian hutan, selain bagian dari tanggungjawab sosial BTNGHS untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan hutan, BTNGHS juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Program kampung konservasi merupakan salah satu program yang memadukan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan dengan melibatkan berbagai pihak untuk membantu kelangsungan dari program ini. Namun pada tahap awal, program kampung konservasi ini dipelopori oleh JICA. JICA berusaha menjembatani kepentingan

lingkungan dan kepentingan masyarakat. Dengan konsep Model Kampung Konservasi (MKK), JICA mencoba membantu TNGHS dalam mereboisasi kembali hutan yang gundul melalui konsep partisipasi masyarakat, dan melakukan pengembangan usaha ekonomi produktif untuk masyarakat di dalam kawasan.

Melalui MKK, pengelola kawasan TNGHS mencoba membina kelompok-kelompok masyarakat yang dihimpun melalui wadah MKK yang didukung oleh pendanaan dari JICA. Pilot proyek MKK tahun 2003-2007 ini dilakukan oleh JICA di empat kampung yaitu: Kampung Sukagalih, Kampung Cimapag, Kampung Cisalimar dan Kampung Sirnaresmi.

Pada kampung dengan program MKK yang dinilai berhasil (Kampung Sukaglih Desa Cipeuteuy), menunjukkan adanya beberapa perubahan lingkungan fisik kampung serta perubahan dari sikap dan perilaku masyarakatnya. Hasil pengamatan fisik menunjukkan bahwa kampung Sukagalih tertata dengan baik, kebersihan kampung juga sangat terjaga. Semua orang didalam kampung tersebut berupaya untuk menunjukkan citra kampung yang bersih. Mereka tidak segan-segan membersihkan jalan yang dilaluinya apabila ditemukan sampah dijalan.

Hasil wawancara dengan Pak Soma ketua MKK Sukagalih Desa Cipeuteuy Kecamatan Kabandungan Sukabumi diperoleh keterangan bahwa pada tahun 2003 TNGHS mengambil alih peran perhutani. Selanjutnya BTNGHS berusaha datang ke masyarakat Kampung Sukagalih untuk melakukan rundingan tentang rencana diterapkannya konsep kampung konservasi. Penyuluh yang datang saat itu adalah bapak Ibrahim. Pada tahun 2004 Kegiatan yang ditawarkan oleh TNGHS saat itu adalah bahwa setiap keluarga diberi hak untuk mengolah tanah garapan seluas 10-15 ha dengan syarat ikut menanam pohon kayu keras secara swadaya, tanpa mengambil hasil kayunya. Istilah yang dikenal adalah terbang tanam. Masyarakat hanya boleh mengambil tanaman sayuran yang ditanam di sela-sela pepohonan tanaman kayu.

Setelah pohonnya besar, masyarakat tidak diperbolehkan kembali menanam di tempat itu, melainkan pindah lokasi ke tempat baru lagi. Kegiatan ini selain memberi tempat untuk lahan garapan masyarakat, juga sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menanam pohon di lahan-lahan kritis. Suatu hari jika sudah tidak ada lahan kritis, maka masyarakat harus berganti mata pencaharian yang tadinya memanfaatkan hutan untuk mencari nafkah dibidang pertanian menjadi memanfaatkan hutan untuk mencari nafkah dibidang jasa. Misalnya jasa penginapan (*home stay*) atau *guide* para peneliti atau wisatawan yang datang ke hutan.

Konsep kampung konservasi tersebut diterima oleh masyarakat Kampung Sukagalih. Penerimaan masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk perjanjian (MoU) antara Masyarakat Kabandungan dengan BTNGHS yang ditandatangani pada tahun 2008. MoU tersebut meliputi lima desa MKK yang ada di Desa Cipeuteuy, yaitu Cisalimar I, Cisalimar II, Sukagalih, Cilodor dan Cisarua.

Melalui konsep MKK di Sukagalih, masyarakat terlibat pada kegiatan rehabilitasi dan reboisasi. Setiap orang diberi jatah lahan garapan di hutan pada lahan kritis seluas 4000 meter persegi, hutan tersebut harus ditanami tanaman kayu keras, disela-selanya diperbolehkan untuk menanam tanaman padi atau sayuran (palawija) yang hasilnya dapat dijual oleh petani sebagai sumber mata pencaharian mereka. Namun demikian, mereka tidak diperkenankan untuk memperluas lahan garapannya. Masyarakat juga dilibatkan dalam observasi partisipatoris. Dua kali dalam sebulan, masyarakat melakukan pengontrolan ke hutan.

Selanjutnya, dampak positif dari kebijakan intervensi pemerintah dalam bentuk MoU tersebut adalah dengan jumlah 40 anggota kepala keluarga, mereka saling bahu membahu untuk menjaga kelestarian hutan sambil memikirkan upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satu upaya meningkatkan income generating adalah dengan mengedepankan konsep ekowisata,

di mana seluruh penduduk Sukagalih diberikan pemahaman pentingnya meningkatkan kinerja mereka. Penduduk disana sudah terpolakan untuk menjaga keasrian kampungnya. Rumah rumah penduduk pun ditata sedemikian rupa, sehingga pada akhir pekan banyak wisatawan baik domestik ataupun asing yang menyewa rumah untuk menghabiskan *week end* di kampung mereka. Tidak hanya sebatas menyediakan rumahnya untuk disewakan, merekapun melayani jasa penyediaan makan pagi, siang dan malam. Selain kegiatan income generating di atas, masyarakat Sukagalih Desa Cipeuteuy Kecamatan Kabandungan juga melakukan berbagai kegiatan lainnya, antara lain: (1) Pembentukan Kube (Kelompok Usaha) Melati yang membuat kripik Home Industri; (2) Poktan Olah raga sebagai wadah kegiatan para pemuda Karang taruna; (3) Kelompok Pelestarian Lingkungan; (4) Pemeliharaan hewan ternak bersama, di mana keuntungan penjualannya dapat dinikmati oleh seluruh anggota secara bergilir. Setiap usaha yang dilakukan oleh masyarakat harus disisihkan untuk uang kas, dan saat ini uang kas yang terkumpul berkisar antara 7-8 juta rupiah. Uang kas ini digunakan sewaktu-waktu untuk membantu masyarakat yang kesulitan misalnya karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia ataupun sakit.

Menyadari kesulitan untuk mengamankan hutan TNGHS, BTNGHS mulai mengembangkan konsep MKK di seluruh kawasan, baik di wilayah Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor maupun Kabupaten Sukabumi, dengan melibatkan berbagai instansi pemerintah terkait maupun pihak perusahaan swasta yang berada di kawasan dan sekitar kawasan taman nasional, antara lain melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi Banten, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, PLN, ANTAM, CIFOR, TNGHS. Di Kabupaten Lebak, kegiatan MKK dipusatkan di Resort Gunung Bedil, Resort Cisoeka dan Resort Cibedug, dengan melibatkan pembinaan dan pendanaan dari JEEF dan DIPA-TNGHS. Program yang dilakukan antara lain pemanfaatan air bersih kerjasama

antara Taman Nasional dengan PLN dan JEEF yaitu di kampung lebak Picung, kampung lebak Sangka dan kampung Cikuning. Di Kabupaten Bogor, kegiatan MKK dipusatkan di Resort Gunung Talaga, terdiri atas: Resort Gunung Kencana; Resort Gunung Butak; Resort Gunung Botol; Resort Gunung Salak 1; Resort Gunung Salak 2. Kegiatan MKK di Kabupaten Bogor menggandeng pendanaan dan pembinaan dari CIFOR dan ANTAM. Di Kabupaten Sukabumi kegiatan MKK dipusatkan di Resort Gunung Kendeng, Resort Cimanjaya, Resort Gunung Bodas, dan Resort Kawaah Ratu. Kegiatan MKK di Kabupaten Sukabumi dilakukan oleh TNGHS-JICA dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Total MKK di seluruh kawasan TNGHS sampai tahun 2012 adalah 39 buah.

Fakta berkembangnya program MKK dengan melibatkan kolaborasi antara instansi pemerintah dengan perusahaan swasta menurut Rahmawati (2004) menunjukkan bahwa adanya afiliasi antara negara dan perusahaan swasta. Dukungan pendanaan dari perusahaan swasta tersebut tidak semata-mata untuk kepentingan masyarakat lokal, melainkan ada keuntungan ekonomi yang diperoleh perusahaan atas kebijakan pemerintah yang mengizinkan aktivitas perusahaan di kawasan TNGHS melalui perjanjian pinjam pakai. Afiliasi antara negara dan perusahaan swasta tersebut telah memantapkan otoritas negara selaku pemilik dan pengontrol sumberdaya hutan. Otoritas negara selaku pihak yang berkuasa telah memarginalkan otoritas masyarakat dan kepentingannya terhadap hutan. Selanjutnya Rahmawati (2012) menyebutkan bahwa berkembangnya konsep MKK tersebut menunjukkan implementasi kebijakan bersifat membiarkan atau dipersilahkan tidak, tetapi dilarang juga tidak, dalam penggarapan lahan TNGHS, tidak dapat dipertahankan untuk jangka panjang dalam melestarikan kelestarian lingkungan hutan dan kesejahteraan masyarakat. Kemenangan otoritas negara melawan otoritas masyarakat Kasepuhan, menunjukkan adanya dominasi

otoritas negara atas otoritas masyarakat lokal dimana masyarakat dipaksa untuk menerima konsep pengelolaan kawasan ala taman nasional untuk pelestarian lingkungan.

## SIMPULAN

Kebijakan MKK merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BTNGHS dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan hutan dalam kawasan TNGHS dan mereboisasi/ merehabilitasi lahan- lahan kritis pada kawasan TNGHS. Kebijakan MKK terdiri atas 3 kegiatan yaitu reboisasi/ rehabilitasi observasi partisipatoris dan *income generating*. Implementasi kebijakan MKK ini belum berjalan efektif, karena adanya perbedaan persepsi nilai-nilai budaya masyarakat kedua desa sampel. Desa kampung Sukagalih yang merupakan administrasi pemerintahan biasa dan tidak terikat pada hak otoritas adat Kasepuhan merespon secara positif semua kegiatan program MKK, sedangkan desa kampung Sinar Resmi yang masih terikat adat Kasepuhan tidak merespon positif semua kegiatan. Kebijakan MKK disinyalir sebagai upaya halus pemerintah untuk menyingkirkan masyarakat dari lahan garapan mereka yang berada di kawasan TNGHS dan mengalihkan mata pencaharian penduduknya dari yang tadinya di sektor pertanian menjadi di sektor jasa. Hal ini tentu saja menjadi masalah bagi masyarakat Adat Kasepuhan, karena sistem livelihood mereka di bidang pertanian merupakan *sistem livelihood* yang turun temurun dan menjadi amanat adat. Pelaksanaan program kampung konservasi di sekitar hutan harus memperhitungkan tipe masyarakat dan nilai-nilai budaya lokal masyarakat tersebut. Keberhasilan program kampung konservasi di sekitar hutan sangat ditentukan dari penerimaan masyarakat terhadap program tersebut dan peningkatan partisipasi dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, dalam implementasi kebijakan Model Kampung Konservasi Taman Nasional Halimun Salak pada tahap awalnya dimulai dari sosialisasi tentang sta-

tus kawasan, kejelasan, kepastian regulasi dan kebijakan pemamfaatan hutan. Dalam kebijakan pemamfaatan lahan konservasi TNGHS, masyarakat diberi kebebasan untuk mengelolanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing, asal tidak merusak kelestarian hutan lindung dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengawasan oleh pihak pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam penentuan efektivitas pelaksanaan program Model Kampung Konservasi Taman Nasional Halimun Salak.

## DAFTAR RUJUKAN

- Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. 2005. *Strategi dan Program Model kampung Konservasi TNGHS*
- Faria Ruhana dan Yesi Yuliana. 2010. Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. *Jurnal JIANA*, 10 (2).
- JICA. 2007. *Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak periode 2007-2026*
- Jones, Charles O. 1991. Pengantar Kebijakan Publik (publik policy). Terjemahan oleh Ricky Istamto. Jakarta : C.V. Rajawali.
- Rahmawati, Rita dan Irma Purnamasari. 2004. Pengembangan Model Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Studi Kasus Pada Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun. Bogor: *Buletin Penelitian Universitas Djuanda*, 8(2).
- Rahmawati R. Subair, Idris, Gentini, Dian Ekowati, dan Usep S. 2008. Pengetahuan Lokal Masyarakat Adat Kasepuhan: Adaptasi, Konflik Dan Dinamika Sosio Ekologis. *Sodality: Journal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi Dan Ekologi Manusia*, 2(2).
- Rahmawati R. 2012. A Study Of The Kasepuhan (Sundanese) Community. *International Journal On Social Science Economic And Art*, 2(3).
- Widodo Budiman. 2013. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Perbatasan Kota Dengan Kabupaten. *Jurnal JIANA*, 12 (3).